

EDISI 1
JANUARI-MARET 2025

JEJAK LESTARI

RBP REDD+ GCF OUTPUT II

SULAWESI BARAT



Memulai REDD+: Menanam
Harapan di Hutan Sulbar



Kementerian
Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buletin ini, yang kami hadirkan untuk masyarakat Sulawesi Barat serta pemerintah daerah yang peduli pada isu iklim dan kelestarian hutan.

Buletin ini memuat penjelasan singkat tentang REDD+—sebuah inisiatif global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan—serta bagaimana program ini dijalankan di Sulawesi Barat. Selain itu, kami juga menyajikan galeri visual kegiatan di lapangan dan cerita-cerita dari masyarakat yang terlibat, agar pembaca bisa merasakan langsung semangat, tantangan, dan harapan dalam menjaga hutan kita bersama.

Kami berharap buletin ini dapat menjadi jembatan pengetahuan sekaligus ruang inspirasi. Melalui informasi yang tersaji, semoga tumbuh kesadaran dan dukungan bersama untuk terus melindungi hutan, memperkuat aksi iklim, serta mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buletin ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan menguatkan kolaborasi kita menuju Sulawesi Barat yang hijau dan berkelanjutan.

Selamat membaca!

Tim Redaksi



Pengantar	2
Pengenalan Program	4
Cerita Lapangan Suara-Suara Awo: Harapan dan Tantangan Perhutanan Sosial	7
Galeri Visual	10
Informasi dan Agenda Mendatang	11
Mekanisme Penanganan Keluhan	12
Penutup	13

Daftar Isi

Bagaimana Kondisi Hutan Sulawesi Barat?

Selama ini, Sulawesi Barat yang didiami suku Mandar terkenal dengan laut dan kemampuan masyarakatnya dalam melaut. Namun, selain laut, Sulawesi Barat juga memiliki potensi hutan yang besar. Hutan Sulawesi Barat berdasarkan wilayah perhitungan subnasional FREL meliputi 824.693,95 ha.

Sayangnya, hutan Sulawesi Barat mengalami berbagai ancaman, baik itu melalui deforestasi maupun degradasi. Tingkat deforestasi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2006-2020 mencapai 4.776,53 hektar per tahun. Angka tertinggi deforestasi ditunjukkan pada lahan kering sekunder sebesar 4.370,34 per tahun. Adapun laju degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2006 sampai 2020 sebesar 664,77 hektar per tahun pada hutan lahan kering primer (660,35 hektar per tahun) dan hutan mangrove primer (4,42 hektar per tahun). Banyaknya kawasan hutan yang dikelola dan diintervensi tanpa izin, degradasi yang tinggi, dukungan anggaran dan SDM yang terbatas, serta peranan daerah sesuai kewenangan yang masih kurang kemudian semakin memperparah dampak dari krisis iklim.

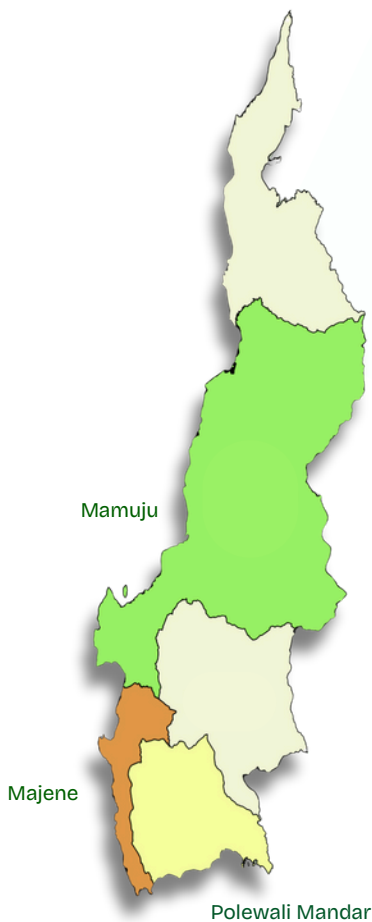
Jenis tutupan lahan sebelum adanya peningkatan cadangan karbon hutan selama periode perhitungan (2006-2020) didominasi oleh semak belukar sebesar 85,74%. Namun, data rata-rata peningkatan biomassa selama periode 2006-2020 mencapai 3.851,35 hektar per tahun. Penutupan lahan tersebut didominasi

hutan lahan kering sekunder dengan rata-rata 3.730,81 hektar per tahun.

Oleh karena itu, saat ini, Provinsi Sulawesi Barat mendukung tercapainya target tingkat emisi GRK sebesar 140 juta ton CO₂ pada tahun 2030 melalui proyek RBP REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang didukung oleh Green Climate Fund (GCF) Output 2. Istilah REDD+ mungkin baru bagi beberapa orang di Sulawesi Barat. Hal ini sangat wajar sebab Sulawesi Barat ini sedang membangun sistem REDD+. Hasilnya akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tutupan lahan, penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan. Peningkatan KUPS melalui peningkatan kapasitas SDM dan dukungan pengembangan usaha.

”

Proyek ini akan mendorong pelaksanaan REDD+ pada Kawasan Hutan sebesar 869.730 Ha. Hasilnya akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tutupan lahan, penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan. Peningkatan KUPS melalui peningkatan kapasitas SDM dan dukungan pengembangan usaha.



Lokasi Program

Program ini akan diuji coba di 3 kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar.



Tujuan Program

"Sulawesi Cipta Forum adalah lembaga perantara dari BPD LH yang menyelenggarakan program Result-Based Payment Green Climate Fund Output 2 di Provinsi Sulawesi Barat. Program ini dimaksudkan untuk mendorong dan membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar memiliki kapasitas dan kesiapan sistem yang disebut arsitektur REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang merupakan sebuah program yang dapat melakukan perlindungan dan pemantauan terhadap kawasan hutan, khususnya agar tidak terjadi deforestasi dan degradasi lahan. Nah, program ini secara garis besar dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan Net Determine Contribution atau NDC secara nasional, sehingga di masa depan, pengelolaan hutan dan sumber daya alam dapat berkelanjutan."

Abdul Syukur Ahmad (Program Manager)

Bagaimana Program GCF RBP REDD+ Mendorong Pengurangan Emisi, Meningkatkan Kesejahteraan, dan Memperkuat Tata Kelola Hutan Lestari di Sulawesi Barat?

GCF RBP REDD+ digunakan untuk memaksimalkan peningkatan target penurunan emisi GRK melalui fasilitasi penguatan kapasitas, aksi tapak, kebijakan dalam pengelolaan hutan lestari, dan perbaikan penghidupan masyarakat sekitar hutan di Sulawesi Barat. Guna mencapai tujuan GCF RBP REDD+ ini maka akan didorong 3 (tiga) komponen program/outcome, yaitu:

Komponen 1. Kemajuan yang dicapai menuju target emisi GRK pada lahan seluas 100 Ha di Provinsi Sulawesi Barat.

Komponen pertama berfokus pada pengelolaan lahan seluas 100 Ha di Sulawesi Barat untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Output yang diharapkan adalah peningkatan stok karbon serta penguatan implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di tingkat provinsi.

Peningkatan stok karbon dilakukan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry, yang mampu menjaga tutupan lahan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Untuk menilai capaian program, dilakukan pula inventarisasi GRK secara berkala. Seluruh kegiatan ini menyangar 12 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Komponen 2. Peningkatan akses, pengelolaan berkelanjutan dan pembagian manfaat terhadap layanan ekosistem.

Komponen ini bertujuan memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan ekosistem secara berkelanjutan serta memastikan adanya pembagian manfaat yang adil. Output yang diharapkan adalah terfasilitasinya sumber penghidupan dan peluang kewirausahaan di kawasan izin kelola Perhutanan Sosial.

Target komponen ini mencakup 15 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan 225 penerima manfaat langsung. Dukungan yang diberikan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi usaha kelompok, pengembangan jejaring pasar, hingga akses pendanaan. Dengan penguatan ini, masyarakat pemegang izin Perhutanan Sosial diharapkan mampu mengelola sumber daya secara produktif sekaligus berkelanjutan.

Komponen 3. Pengelolaan hutan lestari yang didukung dengan penguatan tata kelola hutan pada kawasan seluas 1,099,827 Ha di Provinsi Sulawesi Barat.

Komponen ini difokuskan pada pengelolaan hutan lestari di kawasan seluas 1.099.827 Ha di Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama kegiatan adalah mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui penguatan kelembagaan serta pelaksanaan program di tingkat KPH. Dukungan diberikan melalui penyusunan dokumen RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) pada 12 KPH, sekaligus meningkatkan kapasitas staf KPH dalam mendampingi masyarakat dan menangani potensi konflik tata kelola kawasan.

Pada aspek implementasi REDD+, komponen ini mendorong penyusunan arsitektur REDD+ provinsi yang mencakup Rencana Aksi Daerah, penyusunan FREL/FRL, sistem MRV sub-nasional, serta pengisian SIS REDD+ dan Summary of Safeguards. Semua ini menjadi landasan teknis untuk memastikan penurunan emisi berjalan terukur dan transparan.

Selain itu, komponen ini juga menekankan penerapan kerangka pengaman proyek, meliputi aspek lingkungan dan sosial, mekanisme penanganan keluhan (GRM), serta pengarusutamaan gender. Kerangka pengaman tersebut akan dijalankan secara terintegrasi sesuai tahapan pelaksanaan program.



Suara-Suara Awo: Harapan dan Tantangan Perhutanan Sosial

Penulis: Muhammad Awal Fikri

“Bagaimana sebuah desa kecil di lereng Majene menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat menjaga hutan, di tengah akses jalan yang sulit, tantangan administrasi, dan harapan untuk masa depan yang lebih lestari?”

Desember 2024, angin lembab musim hujan membawa aroma tanah basah ketika kami memulai perjalanan menuju Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene. Desa ini berjarak ±55 km dari pusat kota. Jalan yang kami lalui cukup menantang—terjal, sempit, berkelok, sebagian rusak, bahkan di beberapa titik berlumpur dan dipenuhi batu lepas. Namun, semangat untuk menyapa para pelaku perhutanan sosial di Desa Awo membuat setiap rintangan terasa lebih ringan.

Langkah awal pendampingan dimulai dengan koordinasi bersama KPH Malunda. Di kantor KPH, saya bertemu dengan Kepala KPH, Pak Abdul Hamid, bersama stafnya, Kak Kefin Valensia.

Dalam percakapan hangat namun padat, kami membahas posisi strategis Desa Awo dalam skema Program RBP REDD+ GCF Sulbar. Kak Kefin menyebutkan, di desa ini terdapat dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah mengantongi izin pemanfaatan hutan: KTH Perhutanan Sosial Bukit Harapan dan KTH Perhutanan Sosial Bunga Kemiri. Masing-masing mengelola kawasan seluas 50 hektare dengan komoditas campuran, bahkan sudah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Meski begitu, KPH menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan yang hingga kini masih belum tertata rapi.

Langkah awal pendampingan dimulai dengan koordinasi bersama KPH Malunda. Di kantor KPH, saya bertemu dengan Kepala KPH, Pak Abdul Hamid, bersama stafnya, Kak Kefin Valensia. Dalam percakapan hangat namun padat, kami membahas posisi strategis Desa Awo dalam skema Program RBP REDD+ GCF Sulbar. Kak Kefin menyebutkan, di desa ini terdapat dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah mengantongi izin pemanfaatan hutan: KTH Perhutanan Sosial Bukit Harapan dan KTH Perhutanan Sosial Bunga Kemiri. Masing-masing mengelola kawasan seluas 50 hektare dengan komoditas campuran, bahkan sudah membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Meski begitu, KPH menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan yang hingga kini masih belum tertata rapi.

Pada 12 Desember, kami melanjutkan kunjungan ke Pemerintah Desa Awo. Koordinasi dilakukan di rumah Pj Kepala Desa, Pak Mulyadi, yang menyambut kami dengan ramah. "Kami terbuka selama niatnya baik untuk masyarakat," ucapnya sambil memperkenalkan kami kepada Sekretaris Desa, Pak Abd. Muis. Dari beliau, kami mendapat gambaran lebih luas mengenai kondisi desa: 7 dusun sebagai unit permukiman, 26 kelompok tani, 2 kelompok tani hutan, dan 5 kelompok wanita tani.

Mayoritas penduduk adalah muslim, dengan mata pencaharian utama sebagai petani. "Kami memang hidup dari alam, dari hutan. Di sinilah kami bertahan dan membesarkan anak-anak," ujar Pak Muis, kalimat sederhana yang mengingatkan kami bahwa program perhutanan sosial harus benar-benar menyentuh kehidupan nyata masyarakat.

Gerimis sore menyertai langkah kami menuju rumah Pak Ahmad Idris, Ketua KTH Bukit Harapan di Dusun Awo. Dengan ramah ia menyambut kami di beranda rumahnya. Kelompok yang ia pimpin beranggotakan 18 laki-laki, mengelola kawasan hutan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak 2018. Komoditas yang mereka kembangkan beragam: jati, kemiri, kakao, rambutan, hingga pakan ternak. Mereka juga telah membentuk dua unit KUPS. KUPS Silvopastura, dipimpin Pak Mulyadi, mengintegrasikan tanaman dan ternak, sementara KUPS Agroforestri, di bawah Pak Irham, menggabungkan berbagai tanaman kehutanan dan pangan. "Saat kami menerima bantuan bibit jati dan gamal dulu, semangatnya luar biasa untuk menjaga hutan. Sayangnya, pendamping lama belum sempat melengkapi dokumen kelembagaan," kata Pak Ahmad. Tantangan administratif inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah, dan akan kami diskusikan lebih lanjut bersama KPH.





Keesokan harinya, kami menyambangi KTH Bunga Kemiri di Dusun Awo. Ketua kelompok, Pak Muhammad Sawir, menyambut dengan sikap bersahaja. Bersama 15 anggotanya, ia mengelola lahan perhutanan sosial dengan tanaman kemiri, kakao, langsung, dan jati. Kelompok ini juga memiliki KUPS Bunga Kemiri yang dipimpin Muh. Tahir. Namun, mereka masih berada di tahap awal penguatan usaha. “Kami butuh tahu ke mana hasil ini bisa dijual, bagaimana mengolahnya lebih baik,” ungkap salah satu anggota dengan penuh harap.

Tantangan lain juga hadir dari faktor alam. Akses jalan yang sulit membuat beberapa dusun belum bisa kami observasi secara menyeluruh. “Musim hujan membuat jalanan nyaris tak bisa dilalui. Kami perlu menunggu cuaca cerah,” ucap saya kepada Irham Idris, program officer, saat berdiskusi di Dusun Sumakuyu, Desa Onang. Selain itu, sejumlah kelompok masih belum memegang dokumen penting seperti SK atau RKPS karena belum diserahkan secara lengkap dari pendamping sebelumnya. Hal ini menyulitkan mereka dalam menyusun rencana kerja maupun mengakses program bantuan.

Namun, di balik segala keterbatasan itu, kami menemukan kekuatan yang lebih berharga: semangat masyarakat. Di setiap rumah yang kami singgahi, selalu ada senyum ramah, sapaan anak-anak, dan tawa ringan ibu-ibu di halaman. Kehangatan mereka menjadi energi tambahan bagi kami.

Perjalanan di Desa Awo bukan sekadar mendata atau memverifikasi program, tetapi juga proses mendengar, membangun kepercayaan, dan menyatu dengan kehidupan warga. Kami belajar bahwa perhutanan sosial bukan semata skema formal, melainkan upaya bersama untuk memulihkan hubungan manusia dengan hutannya—dengan kerja nyata, dengan kebersamaan, dan dengan harapan yang terus tumbuh.

Galeri Visual

9 Januari 2025



FGD Persiapan Pembentukan POKJA REDD+ Sulawesi Barat di BAPPERIDA

22 Januari 2025



Workshop Kick-Off Meeting Program RBP REDD+ GCF di Hotel Maleo

9 Januari 2025



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Proklim di Kelurahan Mamungu, Lingkungan Timbu

22 Januari 2025



Fasilitasi MPA (Masyarakat Peduli Api) di Sudu dan Karossa

9 Januari 2025



Fasilitasi MPA (Masyarakat Peduli Api) di Budong-Budong tanggal

22 Januari 2025



Penyusunan Rancangan Teknis RHL Agroforestry 200 batang/ha bersama KTH Sabar Menunggu, Kab. Polewali Mandar

Informasi dan Agenda Mendatang



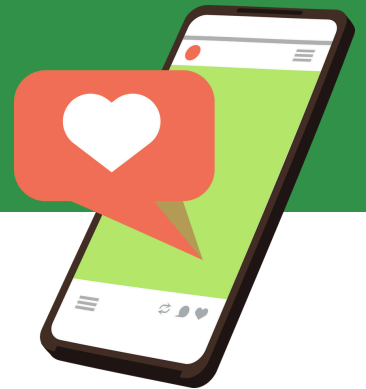
Finalisasi Dokumen Inventarisasi
GRK Sulawesi Barat

Pelatihan Pencatatan dan
Registrasi Calon Lokasi



Mata dari Langit: Pelatihan Drone
untuk Jaga Hutan Sulbar

Sosialisasi dan Bimtek Program
Kampung Iklim



KANAL INFORMASI



SCF.OR.ID

info@scf.or.id



@scf_id

Jl. Taman Gosyen Raya II,
Aeropala, Kassi-Kassi,
Rappocini, Kota Makassar



Sulawesi Cipta Forum



Sulawesi Cipta Forum

0411-898-7896 / +6285395211509



Scan untuk
mengirim aduan



Mekanisme Penanganan Keluhan

01. PENGAJUAN KELUHAN

Keluhan diterima melalui kontak keluhan 0853-9777-3020, atau melalui email info@scf.or.id yang dibuka setiap minggu

02. VERIFIKASI DAN PENERIMAAN

Tiap keluhan yang masuk dicatat dan dikategorikan jenisnya

03. PENYELIDIKAN DAN ANALISIS

Sehari setelah proses pencatatan selesai, keluhan akan dibahas dalam rapat bagian sekretaris, SDM, Logistic dan MEAL. Tim pencari fakta akan melakukan investigasi atas keluhan masuk. Proses investigasi dilakukan paling lama 3 hari.

04. PENYUSUNAN RENCANA PENYELESAIAN

Hasil Investigasi tim pencari fakta akan kembali dibahas dalam rapat pembahasan bersama departemen Pengembangan Komunitas, Kemitraan Dan Inovasi dan Ketua bidang terkait pemecahan masalah dan penindakan untuk selanjutnya dilakukan tindakan penyelesaian.

05. IMPLEMENTASI PENYELESAIAN

Proses penyelesaian keluhan akan mulai diterapkan setelah akar masalah selesai dirembukkan dan rencana tindakan rampung.

06. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi penyelesaian akan terus dalam pemantauan. Dalam hal penanganan keluhan tidak dapat diselesaikan, akan diajukan ke rapat Dewan Board sebagai ruang pengambilan keputusan tertinggi.

07. PENUTUPAN KELUHAN

Kasus ditutup setelah keluhan tertangan

08. PROSES BANDING (OPSIONAL)

Penutup

Buletin ini kami hadirkan sebagai ruang berbagi cerita, pengetahuan, dan semangat menjaga hutan di Sulawesi Barat melalui inisiatif REDD+. Kami percaya, upaya menjaga hutan dan menghadapi tantangan iklim tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus dikerjakan bersama-sama.

Karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua mitra yang telah berjalan bersama: Bapperida, Dinas Kehutanan, KPH, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS Karama, BPK, Balai Perhutanan Sosial, Balai PPI Wilayah Sulawesi, Balai Besar KSDAE (TN Gendang Dewata), Pemerintah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Dinas Tanaman Pangan, KTH/KUPS, Pemerintah Desa, akademisi, mitra pembangunan, sektor privat, koperasi, perbankan, serta seluruh masyarakat Sulawesi Barat.

Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak inilah yang membuat harapan untuk menjaga hutan tetap hidup. Semoga sinergi ini terus tumbuh, sehingga apa yang kita rawat hari ini akan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kita kelak.

Tim Redaksi



Tim Redaksi

Muliadi Makmur
Rafiqah Ulfah Masbah
Arif Maulana Talitti Mattata
Muhammad Awal Fikri Sy

Tim penulis

Muhammad Awal Fikri Sy
Arif Maulana Talitti Mattata

Editor

Arif Maulana Talitti Mattata

Desain dan Tata Letak:

Rafiqah Ulfah Masbah
Muhammad Awal Fikri Sy

Fotografer

Zaenal
Ahmad Rifai
Muhammad Sukri
Hilda Ningsih
Junaib Arsa
Muhammad Awal Fikri Sy

Penanggung Jawab Program

Dr. Arham, M. Sc.